

ABSTRAK

Nama : Bayu Setia Permana, S.H.
Minat Studi : Peradilan
Judul Tesis : Kedudukan Saksi Mahkota dalam Putusan Mahkamah Agung

Posisi saksi mahkota menyebabkan berbagai pendapat, baik dari praktisi dan akademisi, mengenai pengajuan saksi mahkota sebagai bukti dalam proses pidana. Beberapa pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota diizinkan karena bertujuan untuk mencapai rasa keadilan publik. Tetapi beberapa berpendapat, bahwa penggunaan saksi mahkota tidak diizinkan karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Bahkan perbedaan persepsi tentang penggunaan saksi mahkota juga muncul dalam berbagai putusan Mahkamah Agung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan melakukan studi pada teori pengaturan saksi mahkota berdasarkan KUHAP dan UU Korupsi dan rasio *decidendi* putusan Mahkamah Agung yang tidak memungkinkan dan yang memungkinkan penggunaan saksi mahkota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Dari hasil penelitian ini akan diketahui konsep kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi yang telah menjadi keputusan pengadilan dan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan menganalisis dasar *ratio decidendi* putusan Mahkamah Agung yang dikaji oleh teori-teori dalam pendapat atau pertimbangan yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung, yang dalam penelitian ini dikemukakan teori penemuan hukum (*rechtfinding*), dan mengetahui pengaturan saksi mahkota dalam KUHAP dan UU Korupsi yang sering digunakan dalam praktek serta menentukan hak dan kewajiban sebagai terdakwa untuk diperiksa sebagai saksi mahkota dengan ketentuan perundang-undangan.

Kata Kunci : *Putusan, Mahkamah Agung, Saksi Mahkota, Pendapat.*

ABSTRACT

Name : Bayu Setia Permana, S.H
Study Program: Judicial Science
Title : The Position of Crown Witness In The Supreme Court Decision

Position crown witness led to a variety of opinions, both from practitioners and academics, regarding the submission of the crown witnesses as evidence in criminal proceedings. Some argue that the use of crown witness be allowed as it aims to achieve a sense of public justice. But some argue that the use of crown witness was not allowed because it is contrary to human rights. Even differences in perceptions about the use of crown witness also appeared in numerous Supreme Court ruling. The aim of this study was to determine and conduct studies on the theory of the crown witness arrangements based on the Criminal Procedure Code and the Law on Corruption and the ratio decidendi Supreme Court ruling that does not allow and which enables the use of crown witnesses. The method used in this research is the study of law. From the results of this study will be known concept of cases relating to the issues facing that has been a court decision and who already have permanent legal force by analyzing the basic ratio decidendi putusan Supreme Court studied by theories in opinions or considerations contained in the Decision of the Court Agung, which in this study put forward the theory of legal discovery (rechtvinding), and knowing the setting crown witness in the Criminal Code and the Law on Corruption often digunakandalam practices and determine the rights and obligations as a defendant to be examined as a witness crown with the statutory provisions.

Keywords: Decision, Supreme Court, Crown Witness, Opinion.

DAFTAR PERUNDANG –UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana

[Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi](#)

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*

DAFTAR KONVENSI INTERNATIONAL

ICCPR – International Covenant on Civil and Political Right 1966

Konvensi PBB Anti Korupsi – United Nations Convention Against Corruption 2003



DAFTAR PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989, Kasus Subadra
Putusan Mahkamah Agung No. 1174K/Pid/1994, Kasus Marsinah
Putusan Mahkamah Agung No. 381K/Pid/1994, Kasus Marsinah
Putusan Mahkamah Agung No. 1592 K/Pid/1994, Kasus Marsinah
Putusan Mahkamah Agung No. 1706 K/Pid/1994, Kasus Marsinah



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas ridho serta kuasanya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Airlangga, sekaligus anggota tim penguji tesis;
3. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. selaku Ketua Tim Penguji Tesis;
4. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan sekaligus anggota tim penguji tesis.
5. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. selaku anggota tim penguji tesis.
6. Para dosen pengajar pada Program Magister Hukum, yang memberikan kepada saya kesempatan kuliah, belajar dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi;
7. Orangtua, istri, dan keluarga besar;
8. Rekan-rekan kuliah yang bersama-sama berjuang menyelesaikan studi;
9. Keluarga besar Pengadilan Negeri Majalengka;
10. Bapak dan Ibu pada Sekretariat Magister Hukum Universitas Airlangga;

Semoga Allah yang Mahakuasa memberikan limpahan kebaikan atas budi baiknya. Teriring harapan semoga penulisan tesis ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 23 September 2015

Penulis